ECOTECHNOPRENEUR: Journal Economics Technology & Entrepreneur

http://azramedia-indonesia.azramediaindonesia.com/index.php/ecotechnopreneur/index
DOI : https://doi.org/10.62668/ecotechnopreneur.v4i04.2051
Email : info@azramediaindonesia.com

Open Access

INTEGRASI COMMUNITY-BASED TOURISM DAN KONSERVASI LINGKUNGAN DALAM PERENCANAAN PARIWISATA BERKELANJUTAN MELALUI PENDEKATANSITUATION, QUESTION, LITERATURE, RECOMMENDATION (SQLR)

Pahima*[1], Imaduddin Al Azzam[2]
[1,2] Institut Teknologi Bandung, Kota Bandung, Indonesia
*Corresponding Author: pahimapima16@gmail.com

Info Article
Received :
02 Oktober 2025
Revised :
01 November 2025
Accepted :
04 Desember 2025
Publication :
30 Desember 2025

Keywords:
Community-Based Tourism, Environmental Conservation, Sustainable Tourism, Tourism Planning, SQLR

Kata Kunci:
Community-Based Tourism, Konservasi Lingkungan, Pariwisata Berkelanjutan, Perencanaan Pariwisata, SQLR.

Licensed Under a
Creative Commons Attribution 4.0 International License

Abstract: *The development of sustainable tourism faces significant challenges, including environmental degradation, unequal distribution of economic benefits, and limited integration of local communities in planning processes. Environmental conservation serves as a fundamental pillar in ensuring the ecological sustainability of destinations, while Com munity-Based Tourism (CBT) emphasizes active community participation in tourism development. This study aims to analyze the integration of CBT and environmental conservation in sustainable tourism planning using the Situation, Question, Literature, and Recommendation (SQLR) appro ach. Specifically, the study identifies the context and issues of conservati on-based CBT implementation, formulates research questions addressing conceptual and practical gaps, reviews relevant literature to examine existing integration models, and provides recommendations for future theoretical and research development. The findings indicate that successful integration occurs when local communities act not only as economic beneficiaries but also as key decision-makers, resource mana gers, and environmental monitors. Based on these findings, this study pro poses the Community-Led Conservation Tourism Framework (CLCTF) as a conceptual model for sustainable tourism planning.*

Abstrak: Perkembangan pariwisata berkelanjutan menghadapi tantangan berupa degradasi lingkungan, ketimpangan distribusi manfaat ekonomi, serta rendahnya keterlibatan masyarakat lokal dalam perencanaan. Konservasi lingkungan menjadi pilar penting keberlanjutan destinasi, sementara *Community-Based Tourism (CBT)* menekankan partisipasi aktif masyarakat. Namun, penerapan CBT masih menghadapi kendala konseptual dan praktis. Penelitian ini bertujuan menganalisis integrasi CBT dan konservasi lingkungan dalam perencanaan pariwisata berkelanj utan menggunakan pendekatan Situation, Question, Literature, Recomme ndation. Kajian ini mengidentifikasi konteks dan isu implementasi CBT berbasis konservasi, menganalisis literatur terkait model integrasi, serta merumuskan rekomendasi pengembangan teori dan riset. Hasil kajian menunjukkan integrasi berhasil ketika masyarakat lokal berperan sebagai pengambil keputusan, pengelola sumber daya, dan pemantau lingkungan. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini mengusulkan *community-led conservation tourism framework (CLCTF)* yang menempatkan komunitas lokal sebagai penggerak utama konservasi dan pariwisata berkelanjutan.

INTRODUCTION

Pariwisata berkelanjutan telah menjadi paradigma penting dalam pengembangan destinasi global, terutama di wilayah dengan nilai ekologis dan sosial yang sensitif. Pergeseran ini muncul sebagai respons terhadap dampak negatif pariwisata konvensional yang terbukti memicu tekanan ekologis, marginalisasi ekonomi masyarakat lokal, serta homogenisasi budaya (Sharpley, 2020). Pendekatan *Community-Based Tourism* (CBT) berkembang sebagai alternatif yang menekankan keadilan distribusi manfaat, partisipasi komunitas, serta keberlanjutan jangka panjang melalui tata kelola berbasis lokal (Giampicolli & Mtapuri, 2015). CBT tidak hanya diposisikan sebagai model pemberdayaan ekonomi, tetapi juga sebagai strategi untuk memastikan bahwa masyarakat lokal memiliki ruang dalam pengambilan keputusan pengelolaan destinasi (Goodwin & Santilli, 2009). Konservasi lingkungan muncul sebagai elemen krusial dalam wacana keberlanjutan, terutama karena sebagian besar destinasi wisata mengandalkan sumber daya rentan terhadap eksploitasi (Snyman & Bricker, 2019). Integrasi antara konservasi lingkungan dan CBT menjadi relevan mengingat keduanya memiliki tujuan yang saling melengkapi, yaitu perlindungan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal (Stone & Stone, 2020).

Community-Based Tourism (CBT) sering diposisikan sebagai pendekatan alternatif dari model pariwisata massal karena memprioritaskan keterlibatan masyarakat lokal, distribusi manfaat ekonomi, dan pemeliharaan identitas budaya (Giampiccoli & Mtapuri, 2015). Secara teori, CBT mendorong masyarakat untuk menjadi aktor sentral yang terlibat dalam pengambilan keputusan, pengelolaan destinasi, dan pembagian keuntungan ekonomi (Goodwin & Santilli, 2009). Oleh karena itu, CBT dianggap sebagai instrumen untuk memperkuat kontrol lokal dan meminimalkan dominasi pemangku kepentingan eksternal.

Prinsip operasional CBT mencangkup: (1) partisipasi masyarakat lokal, (2) distribusi manfaat yang adil, (3) penggunaan sumber daya lokal, (4) pelestarian lingkungan, (5) kolaborasi multipihak, dan (6) keberlanjutan jangka panjang (Tolkach & King, 2015). Meskipun ideal secara teori, CBT kerap menghadapi tantangan struktural. Beberapa studi menemukan bahwa CBT sering beroperasi di bawah hierarki kekuasaan lokal, ketergantungan donor,serta keterbatasan dalam kapasitas manajemen dan pemasaran (Stone & Stone, 2020). Kritik lain juga muncul ketika CBT hanya menjadi label, tetapi praktiknya tetap dikuasai investor dan elite lokal *(token participation),* sehingga gagal memenuhi tujuan pemberdayaan (Jameel et al., 2025). Karena itu, CBT

dipandang bukan hanya sebagai model teknis, tetapi juga sebagai proses sosial-politik yang membutuhkan tata kelola adaptif.

Konservasi lingkungan dalam pariwisata merujuk pada upaya menjaga integritas ekosistem melalui perlindungan biodiversitas, pembatasan eksploitasi sumber daya, dan penggunaan model pengelolaan berbasis sains dan komunitas (Balmford et al., 2009). Untuk destinasi berbasis alam, konservasi lingkungan bukan hanya strategi teknis, tetapi menjadi fondasi keberlanjutan jangka panjang karena daya tarik wisata sangat bergantung pada kualitas ekologi. Menurut Snyman & Bricker (2019), pendekatan konservasi dalam pariwisata dapat dikategorikan ke dalam tiga model utama: (1) *state-driven conservation,* pemerintah menjadi aktor utama, (2) *market-based conservation,* pendanaan konservasi melalui aktivitas wisata seperti ekowisata atau wisata berbasis konservasi, dan (3) *community-based conservation,* masyarakat lokal dilibatkan dalam perencanaan, monitoring, dan pemanfaatan sumber daya. Namun, konservasi sering menjadi sumber konflik ketika kebijakan perlindungan lingkungan membatasi akses masyarakat terhadap sumber daya alam yang sebelumnya merupakan bagian dari mata pencaharian masyarakat tersebut. Studi di berbagai negara menunjukkan bahwa konservasi yang tidak sensitif terhadap konteks sosial berpotensi menciptakan eksklusi ekologis dan ketimpangan akses (Scheyvens & Momsen, 2008).

Pariwisata berkelanjutan menjadi kerangka payung bagi CBT dan konservasi lingkungan karena menekankan keseimbangan antara dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan sebagai satu sistem (Sharpley, 2020). UNWTO (2004) menggambarkan pariwisata berkelanjutan sebagai proses yang harus memastikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat lokal, keberlanjutan ekologi, dan pengalaman wisata yang bertanggung jawab. Secara teori, pariwisata berkelanjutan berada di persimpangan antara teori tata kelola *(governance theory),* partisipasi masyarakat, dan ekonomi regeneratif. Sejumlah studi mengandalkan indikator lingkungan atau ekonomi semata, tetapi membutuhkan rekonstruksi hubungan kekuasaan dalam tata kelola destinasi (Goodwin & Santilli, 2009). Oleh karena itu, integrasi CBT dan konservasi lingkungan secara eksplisit mendukung tiga dimensi keberlanjutan: (1) sosial, yakni pemberdayaan komunitas dan partisipasi masyarakat lokal, (2) ekonomi, yaitu diversifikasi pendapatan lokal dan distribusi manfaat yang adil, (3) lingkungan, yakni perlindungan ekosistem destinasi wisata. Korelasi antara CBT dan konservasi lingkungan dapat dipahami sebagai hubungan komplementer, bukan paralel. CBT menyediakan mekanisme sosial dan ekonomi untuk mendukung konservasi, sementara konservasi menciptakan nilai ekologis

yang meningkatkan daya tarik destinasi dan mendukung CBT (Snyman & Bricker, 2019). Hubungan ini hanya dapat bekerja jika ada tata kelola kolaboratif yang mengatur peran aktor publik, swasta, serta masyarakat lokal (Tolkach & King, 2015). Tanpa tata kelola kolaboratif, integrasi CBT dan konservasi beresiko menghasilkan konflik akses sumber daya atau asimetri kekuasaan.

Namun, integrasi antara CBT dan konservasi lingkungan tidak selalu berjalan ideal. Tantangan yang muncul mencakup keterbatasan kapasitas komunitas dalam pengelolaan destinasi, ketergantungan pada dukungan eksternal, konflik antara tujuan ekonomi dan konservasi, serta kurangnya model tata kelola yang menjembatani kepentingan berbagai pemangku kepentingan (Tolkach & King, 2015). Pembuat kebijakan sebaiknya memprioritaskan penciptaan kerangka legislatif yang transparan dan struktur tata kelola yang jelas untuk mendorong keterlibatan masyarakat serta memastikan pembagian manfaat dari pariwisata secara adil.

Perencana dan pemerintah lokal dapat meningkatkan hasil implementasi dan mendorong kepemilikan lokal dengan mengintegrasikan pengembangan sistem dengan inisiatif peningkatan kapasitas masyarakat, termasuk program kewirausahaan, pelatihan keterampilan, dan perencanaan partisipatif (Jameel et al., 2025). Untuk mengisi celah tersebut, artikel ini menggunakan pendekatan SQLR *(Situation, Question, Literature, Recommendation)* sebagai kerangka tinjauan analitis. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi kondisi nyata, merumuskan pertanyaan kritis, dan menyusun rekomendasi akademik berbasis temuan literatur (Booth et al., 2016). Dengan demikian, artikel ini tidak hanya menyajikan tinjauan sistematis, tetapi juga mengusulkan kerangka konseptual integrasi CBT dan konservasi lingkungan dalam perencanaan pariwisata berkelanjutan.

Tujuan artikel ini ada tiga yaitu pertama, mengelaborasi hubungan teoritis antara CBT, konservasi lingkungan, dan pariwisata berkelanjutan. Kedua, mengevaluasi literatur melalui analisis SQLR untuk memetakan tantangan, peluang, serta model integrasi yang telah dikembangkan di berbagai konteks. Ketiga, menyusun kerangka konseptual sebagai rekomendasi akademik dan dasar penelitian lanjutan terkait implementasi integrasi CBT dan konservasi dalam konteks tata kelola pariwisata berkelanjutan. Dengan kontribusi tersebut, artikel ini diharapkan mampu memperkaya wacana teoritis dan memberikan arah yang lebih jelas bagi pengembangan kebijakan, penelitian lanjutan, serta implementasi strategi pariwisata yang sensitif terhadap konteks sosial dan ekologis.

METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Situation, Question, Literature, Recommendation* (SQLR) sebagai metode sistematik untuk membangun analisis konseptual dan menghasilkan rekomendasi. Pendekatan SQLR dikembangkan sebagai model analitis yang memadukan pemetaan konteks, formulasi pertanyaan kunci, sintesis literatur, dan penarikan rekomendasi strategis secara terstruktur. Pendekatan ini umumnya digunakan dalam kajian konseptual, penelitian kebijakan, dan penyusunan kerangka teoritis karena dianggap mampu menyusun alur berpikir yang komprehensif dan logis (Booth et al., 2016). Tahap pertama, *situation* digunakan untuk memetakan konteks permasalahan terkait kebutuhan integrasi *Community-Based Tourism* (CBT) dan konservasi lingkungan dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan. Analisis situasional ini bertujuan menegaskan urgensi penelitian serta mengidentifikasi kesenjangan antara teori dan praktik (Xiao & Smith, 2006). Tahap kedua, *question* berfokus pada perumusan pertanyaan penelitian yang bersifat eksploratif dan konseptual. Pertanyaan ini diarahkan untuk menggali bagaimana integrasi antara CBT dan konservasi lingkungan dapat diperkuat dalam kerangka perencanaan pariwisata berkelanjutan.

Tahap ketiga, *literature* merupakan proses sintesis sistematis terhadap literatur akademik yang relevan. Sumber literatur mencakup jurnal bereputasi dari Elsevier, Taylor & Francis, Springer, dan MDPI, termasuk studi-studi mengenai CBT, ekowisata, konservasi, tata kelola pariwisata, dan pembangunan berkelanjutan. Tahap terakhir, *recommendation* berfungsi merumuskan implikasi strategis, model konseptual, serta rekomendasi kebijakan berdasarkan analisis literatur dan pertanyaan penelitian. Rekomendasi yang dihasilkan berorientasi pada tata kelola kolaboratif, penguatan kapasitas masyarakat, pengaturan manfaat konservasi, serta mekanisme perencanaan partisipatif. Secara keseluruhan, pendekatan SQLR memungkinkan penelitian ini menghasilkan analisis yang sistematis, kritis, dan komprehensif mengenai integrasi CBT dan konservasi lingkungan dalam rangka pembangunan pariwisata berkelanjutan karena mampu menjembatani kesenjangan teori-kebijakan sekaligus membangun dasar konseptual bagi penelitian lanjutan di tingkat empiris.

RESULTS AND DISCUSSION

Results

Pariwisata berkelanjutan tidak dapat dipahami hanya sebagai keseimbangan normatif antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, tetapi harus diposisikan sebagai sistem sosio-ekologis yang saling bergantung *(interdependent socio-ecological system)*

(Sharpley, 2020). Dalam konteks ini, CBT berperan sebagai mekanisme sosial sosial yang memungkinkan konservasi lingkungan dijalankan secara lebih legitim dan berkelanjutan, sementara konservasi menyediakan fondasi ekologis yang menopang keberlanjutan ekonomi dan sosial destinasi (Stone & Nyaupane, 2015). Studi dalam *the journal of economic concerns* menyebutkan bahwa destinasi yang mengintegrasikan partisipasi masyarakat partisipasi masyarakat ke dalam pengelolaan sumber daya cenderung memiliki tingkat kepatuhan konservasi yang lebih tinggi dan konflik yang lebih rendah dibandingkan dengan pendekatan konservasi yang eksklusif (Acharya, 2023). Temuan ini memperkuat argumen bahwa CBT tidak dapat dipisahkan dari konservasi apabila tujuan keberlanjutan ingin dicapai secara substansial.

Meskipun secara konseptual integrasi CBT dan konservasi lingkungan dipandang ideal, kajian literatur menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara konsep dan praktik. Banyak inisiatif CBT yang masih berorientasi pada peningkatan pendapatan jangka pendek tanpa integrasi indikator ekologis yang jelas, sehingga berpotensi menciptakan tekanan baru terhadap sumber daya alam (Zhang et al., 2022). Di sisi lain, pendekatan konservasi yang terlalu teknokratis sering kali mengabaikan konteks sosial dan ekonomi masyarakat lokal yang pada akhirnya melemahkan dukungan masyarakat terhadap upaya konservasi (Snyman & Bricker, 2019). Hasil review juga menunjukkan bahwa salah satu hambatan utama integrasi adalah lemahnya tata kelola kolaboratif *(collaborative governance).* Banyak destinasi belum memiliki mekanisme kelembagaan yang mampu menjembatani kepentingan pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan lembaga konservasi secara setara (Bramwell & Lane, 2011). Akibatnya, CBT sering terjebak dalam bentuk partisipasi simbolik saja, sementara keputusan strategis tetap didominasi oleh aktor eksternal. Lebih lanjut, Sharpley (2020) menegaskan bahwa kegagalan pembangunan pariwisata berkelanjutan umumnya bukan disebabkan oleh ketiadaaan konsep, melainkan oleh lemahnya mekanisme integrasi antara kepentingan sosial, ekologis, dan ekonomi dalam kerangka perencanaan dan tata kelola destinasi.

Pada tahap *situation,* literatur menunjukkan adanya ketegangan struktural antara orientasi pertumbuhan ekonomi pariwisata dan kebutuhan konservasi lingkungan. Studi dalam *International Journal of Geoheritage and Parks* menegaskan bahwa pertumbuhan pariwisata yang tidak terkontrol telah menyebabkan degradasi sumber daya alam, konflik sosial, dan penurunan kualitas pengalaman wisata (Samal & Dash, 2023). Dalam konteks ini, CBT sering dipromosikan sebagai solusi normatif karena menempatkan masyarakat lokal sebagai pemilik, pengelola, dan penerima manfaat utama dari aktivitas pariwisata

(Goodwin & Santilli, 2009). Dalam praktiknya, CBT telah menjadi salah satu strategi penting untuk mengatasi masalah ketimpangan manfaat pariwisata dan marginalisasi masyarakat lokal karena model pariwisata konvensioonal cenderung meminggirkan komunitas lokal dalam proses perencanaan, pengelolaan, dan distribusi hasil (Booth et al., 2016). Kondisi ini menunjukkan bahwa integrasi CBT dan konservasi lingkungan bukan sekadar desirabilitas teoritis, tetapi menjadi kebutuhan atas praktik pembangunan destinasi yang inklusif dan berkelanjutan. Namun, implementasi di lapangan sering terjebak pada pendekatan prosedural dan simbolik, yang artinya partisipasi masyarakat bersifat terbatas dan tidak substantif (Tolkach & King, 2015). Situasi ini mengakibatkan konservasi lingkungan diperlakukan sebagai elemen tambahan, bukan sebagai kerangka utama dalam perencanaan. Akibatnya, tujuan keberlanjutan jangka panjang sering kali tidak tercapai meskipun destinasi mengklaim mengadopsi pendekatan CBT (Stone & Nyaupane, 2015).

Berdasarkan gap dalam literatur dan praktik yang teridentifikasi, pertanyaan riset ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan konseptual antara CBT dan konservasi lingkungan dalam konteks perencanaan pariwisata berkelanjutan?
2. Apa tantangan utama yang dihadapi dalam upaya integrasi CBT dan konservasi lingkungan?
3. Studi kasus apa yang menunjukkan praktik integrasi yang berhasil maupun kurang berhasil?
4. Bagaimana model konseptual integrasi ini dapat diimplementasikan secara sistematis dalam perencanaan destinasi wisata?

Tahap *question* dalam pendekatan SQLR menunjukkan tiga sumber utama yang menyebabkan kegagalan integrasi CBT dan konservasi lingkungan. Pertama, ketimpangan relasi kekuasaan antara masyarakat lokal, pemerintah, dan investor menyebabkan masyarakat hanya dilibatkan pada tahap implementasi bukan perencanaan strategis (Bramwell & Lane, 2011). Kedua, konservasi lingkungan sering dirancang menggunakan pendekatan teknokratik yang kurang mempertimbangkan nilai budaya dan pengetahuan lokal sehingga memicu resistensi sosial (Scheyven & Watt, 2021). Ketiga, absennya mekanisme distribusi manfaat yang adil melemahkan insentif masyarakat untuk berperan aktif dalam konservasi (Snyman & Bricker, 2019). Pertanyaan penelitian kemudian mengarah pada bagaimana perencanaan pariwisata dapat dirancang untuk menjembatani ketegangan tersebut. Integrasi CBT dan konservasi membutuhkan

pendekatan tata kelola kolaboratif yang tidak hanya mengatur peran aktor, namun juga merekonstruksi nilai dan tujuan pembangunan pariwisata (Su et al., 2007).

Pada tahap *literature,* hasil sintesis menunjukkan bahwa pendekatan sistem sosio-ekologis *(socio-ecological systems)* menjadi fondasi teoritis paling relevan dalam menjelaskan integrasi CBT dan konservasi. Dalam praktik perencanaan pariwisata, CBT berperan sebagai mekanisme sosial dan kelembagaan yang memungkinkan konservasi lingkungan diinternalisasi ke dalam proses pembangunan. CBT dipahami sebagai pendekatan yang menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor pusat dalam pembangunan pariwisata melalui kontrol atas sumber daya, keputusan, dan manfaat ekonomi (Dangi & Jamal, 2016). Dalam kerangka ini, masyarakat lokal tidak diposisikan sebagai ancaman terhadap lingkungan, melainkan sebagai penjaga *(stewards)* yang memiliki kepentingan langsung terhadap keberlanjutan sumber daya (Berkes, 2017). Fokus utama adalah pemberdayaan komunitas, keadilan sosial, serta keterlibatan penuh dalam perencanaan dan implementasi kegiatan pariwisata yang sejalan (Booth et al., 2016). Sebaliknya, konservasi lingkungan memberikan landasan ekologis dan etis bagi implementasi CBT. Tanpa kerangka konservasi yang jelas, CBT berisiko terjebak dalam orientasi ekonomi jangka pendek yang justru mendorong eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Oleh karena itu, konservasi berfungsi sebagai batas ekologis *(ecological limits)* yang membingkai ruang gerak CBT dalam perencanaan pariwisata. Integrasi ini memastikan bahwa pengembangan produk wisata, peningkatan kunjungan, dan disversifikasi ekonomi tetap berada dalam kapasitas daya dukung lingkungan destinasi.

Studi di *Annals of Tourism Research* menegaskan bahwa destinasi yang mengintegrasikan pengetahuan lokal ke dalam strategi konservasi menunjukkan tingkat keberlanjutan yang lebih tinggi dibandingkan pendekatan *top-down* (Stone & Stone, 2020). Keberhasilan integrasi sangat bergantung pada tata kelola adaptif *(adaptive governance)* yang artinya kebijakan dan rencana pariwisata dievaluasi secara berkala berdasarkan perubahan kondisi sosial dan ekologis (Zhang et al., 2022). Pendekatan ini memungkinkan CBT dan konservasi saling memperkuat melalui mekanisme pembelajaran sosial dan kolaborasi multipihak. Namun, studi literatur juga menunjukkan bahwa keterlibatan komunitas seringkali bersifat simbolis *(tokenisme)* ketika struktur kelembagaan dominan mengutamakan investasi eksternal dan kebijakan *top-down* yang justru membatasi pengaruh masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada konservasi. Dangi & Jamal (2016) menyebutkan bahwa upaya konservasi sering

kali lebih efektif ketika masyarakat lokal memiliki insentif langsung untuk menjaga ekosistem dan ketika kebijakan konservasi dilandasi oleh modal sosial lokal seperti pengetahuan tradisional. Keberhasilan konservasi tidak hanya ditentukan oleh peraturan formal, tetapi juga oleh nilai-nilai sosial dan praktik lokal yang berkelanjutan. Ini menunjukkan bahwa konservasi yang terpisah dari komunitas dapat gagal dalam jangka panjang karena minimnya legitimasi sosial dan dukungan lokal.

Studi yang dilakukan oleh Sebele (2010) di Khama Rhino Sanctuary Botswana menunjukkan integrasi CBT dan konservasi yang kurang berhasil. Dalam studi tersebut ditemukan bahwa program pariwisata berbasis komunitas memang memiliki potensi untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam konservasi sumber daya alam serta memperbaiki kesejahteraan ekonomi lokal. Namun, aspek implementasi tidak sepenuhnya mulus dan ada tantangan signifikan terkait keterlibatan masyarakat yang masih terbatas serta kebutuhan akan interaksi yang lebih kuat antara pengelola lokal dengan manajemen suaka untuk memastikan distribusi manfaat komunitas benar-benar terintegrasi dalam kedua tujuan tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa tantangan kelembagaan dan partisipasi nyata dapat menghambat efektivitas konservasi ketika CBT dijalankan tanpa struktur partisipatif yang kuat. Berikutnya, studi yang dilakukan oleh Pineda et al., (2023) di Colombia Coastal Lagoon menunjukkan bahwa mayoritas responden percaya partisipasi masyarakat dalam ekowisata mampu mendorong konservasi lingkungan lokal dan partisipasi komunitas adalah faktor penting untuk keberhasilan strategi pariwisata tersebut. Hasil studi ini sejalan dengan prinsip CBT yang menempatkan masyarakat sebagai agen utama dalam pengelolaan destinasi, bukan hanya sebagai penerima manfaat ekonomi tetapi juga sebagai penjaga sumber daya ekologis di wilayah lokal. Keterlibatan masyarakat yang kuat ini berkontribusi pada pemahaman bersama antara ekonomi lokal dan nilai konservasi sehingga menciptakan sinergi yang kuat dan berkelanjutan.

Tahap *recommendation* dalam SQLR menekankan bahwa perencanaan pariwisata berkelanjutan harus bergeser dari pendekatan sektoral menuju pendekatan integratif. Perencanaan yang efektif harus menginternalisasi batas ekologis *(ecological limits)* ke dalam perumusan visi, zonasi, dan pengembangan produk wisata (Sharpley, 2020). Dalam konteks CBT, hal ini berarti masyarakat dan daya dukung lingkungan harus menjadi dasar dalam menentukan skala dan bentuk pengembangan pariwisata. Model *Community-Led Conservation Tourism Framework* (CLCTF) yang dikembangkan dalam penelitian ini sejalan dengan temuan Su et al., (2007) yang menekankan pentingnya *co-*

management dan *shared decision-making.* Pendekatan ini memungkinkan masyarakat lokal, pemerintah, dan aktor swasta berkolaborasi dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan pariwisata. Selain itu, mekanisme distribusi manfaat yang adil menjadi instrumen kunci untuk memperkuat komitmen masyarakat terhadap konservasi lingkungan (Snyman & Bricker, 2019).

Model CLCTF dirancang sebagai kerangka konseptual yang menjembatani dimensi sosial, ekologis, ekonomi, dan kelembagaan dalam perencanaan pariwisata berkelanjutan. CLCTF berakar pada tiga teori besar yaitu: (1) teori tata kelola partisipatif *(partisipatory governance),* yang menekankan pada kolaborasi aktor lokal, pemerintah, dan sektor privat untuk mengambil keputusan bersama yang menjamin legitimasi sosial dan konservasi lingkungan, (2) teori sistem sosio-ekologis, yang melihat destinasi pariwisata sebagai sistem yang saling terkait antara manusia dan lingkungan dengan umpan balik yang kompleks, dan (3) teori *sustainable livelihoods,* yang menekankan diversifikasi mata pencaharian yang aman secara ekonomi tanpa mengorbankan kualitas lingkungan sehingga komunitas lokal memiliki insentif langsung untuk mempertahankan sumber daya alam. CLCTF dibangun atas empat pilar yang saling terintegrasi yaitu: (1) pilar sosial, pilar ini memastikan pemberdayaan komunitas dan partisipasi, (2) pilar ekologis, pilar ini fokus pada konservasi berbasis nilai lokal, (3) pilar ekonimi, pilar ini mengusulkan mekanisme keuangan berkelanjutan, dan (4) pilar kelembagaan, yang berisi tata kelola adaptif dan *multi-stakeholder*.

Adapun mekanisme operasional CLCTF dapat dilakukan melalui empat fase siklus manajemen destinasi yaitu:

1. Diagnostik kontekstual, analisis kondisi awal seperti potensi ekologi, sosial, kultur, dan kualitas layanan. Hasil dari data ini adalah indikator keberlanjutan yang akan dipilih bersama oleh komunitas dan *stakehoder*.
2. Perumusan visi konservasi-CBT, visi strategis disusun melalui *deliberative planning* dengan tujuan kesejahteraan masyarakat, pelestarian ekosistem, dan penguatan kontrol komunitas.
3. Implementasi praktik integratif, meliputi aktivitas pariwisata berbasis konservasi, monitoring keberlanjutan, dan strategi pemasaran yang mengedepankan nilai lingkungan, sosial, serta tata kelola yang adaptif.
4. Evaluasi dan pembelajaran sosial *(social learning),* evaluasi dilakukan berdasarkan indikator sosial dan ekologis, serta adaptasi strategi untuk siklus berikutnya. Tahap ini

memastikan integrasi tidak bersifat linear tetapi berulang *(iterative)* dengan mekanisme evaluatif dan perbaikan terus-menerus.

Meski CLCTF difokuskan oleh sintesis, resistensi terhadap konservasi dalam CBT sering muncul ketika masyarakat hanya diposisikan sebagai penerima manfaat ekonomi tanpa keterlibatan nyata dalam perlindungan ekosistem. Studi yang dilakukan Hafezi et al., (2023) menunjukkan pentingnya hubungan antara partisipasi masyarakat, pelestarian lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan dalam komunitas berbasis pariwisata sebagai bagian dari model keberlanjutan yang lebih luas. Pendekatan adaptif dan kolaboratif terhadap kehutanan dan konservasi tertaut secara konseptual dengan keterlibatan masyarakat yang luas dalam upaya konservasi dan pengembangan pariwisata berbasis lingkungan (Sianipar et al., 2025).

Model CLCTF menegaskan bahwa hubungan konseptual antara CBT dan konservasi lingkungan merupakan konstruksi empiris dan praktik yang dapat dioperasionalkan melalui strukur tata kelola yang responsif, inklusif, dan adaptif. Model ini menawarkan arah praktis bagi pembuat kebijakan, praktisi pariwisata, dan komunitas lokal untuk merancang sistem pariwisata berkelanjutan yang efektif.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil sintesis literatur dan analisis konseptual yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa CBT dan konservasi lingkungan memiliki hubungan yang saling memperkuat satu sama lain *(mutually reinforcing),* namun dalam praktik integrasinya masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan institusional. Pertama, secara konseptual CBT menawarkan kerangka partisipatif yang membuka peluang masyarakat lokal berperan sebagai aktor utama dalam pengelolaan destinasi wisata, sementara konservasi ekologis menyediakan batas ekologis dan prinsip kehati-hatian yang penting untuk menjamin keberlanjutan jangka panjang. Integrasi keduanya menjadi krusial karena pariwisata yang mengabaikan aspek ekologi berpotensi merusak basis daya tarik, sedangkan konservasi yang mengesampingkan dimensi sosial berisiko kehilangan legitimasi dan dukungan masyarakat lokal.

Kegagalan integrasi CBT dan konservasi umumnya tidak disebabkan oleh lemahnya konsep, melainkan oleh persoalan tata kelola *(governance),* ketimpangan kekuasaan antar aktor, keterbatasan kapasitas kelembagaan masyarakat, serta distribusi manfaat ekonomi yang tidak adil. Destinasi wisata yang berhasil mengintegrasikan CBT dan konservasi memiliki ciri utama berupa kepemimpinan lokal yang kuat, mekanisme kolaborasi multipihak, serta kebijakan yang adaptif terhadap dinamika sosial dan

ekologis. Melalui pendekatan SQLR, penelitian ini mengembangkan *community-led conservation tourism framework* (CLCTF) sebagai model konseptual integratif yang menempatkan masyarakat sebagai agen konservasi sekaligus pengelola pariwisata. Model ini menegaskan bahwa konservasi tidak seharusnya diposisikan sebagai pembatas pembangunan, melainkan sebagai fondasi nilai dalam proses perencanaan pariwisata berkelanjutan.

Artikel ini memiliki keterbatasan pada ketergantungan kualitas dan cangkupan studi yang tersedia. Literatur yang dianalisis didominasi oleh konteks tertentu dan belum sepenuhnya merepresentasikan keragaman kondisi sosial, politik, dan ekologis di berbagai destinasi. Selain itu, model konseptual yang diusulkan belum diuji secara empiris sehingga efektivitas implementasinya masih memerlukan validasi lapangan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji model CLCTF melalui studi kasus empiris di destinasi wisata berbasis masyarakat, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia.

Pendekatan *mix method* dapat digunakan untuk mengevaluasi dampak integrasi CBT dan konservasi terhadap kesejahteraan masyarakat, kualitas lingkungan, dan ketahanan destinasi. Selain itu, penelitian berikutnya diharapkan juga mengeksplorasi peran inovasi digital, mekanisme pembiayaan hijau, dan kebijakan lintas sektor dalam memperkuat integrasi pariwisata dan konservasi.

REFERENCES

Acharya, C. N. (2023). SUSTAINABLE TOURISM PERSPECTIVE OF WILDLIFE CONSERVATION AREAS: A CASE STUDY IN NEPAL. *The Journal of Economic Concerns, 14*(1–2), 61–82.

Balmford, A., Beresford, J., Green, J., Naidoo, R., Walpole, M., & Manica, A. (2009). A GLOBAL PERSPECTIVE ON TRENDS IN NATURE-BASED TOURISM. *PLoS ONE, 4*(6), e5955.

Berkes, F. (2017). ENVIRONMENTAL GOVERNANCE FOR THE ANTHROPOCENE? SOCIAL–ECOLOGICAL SYSTEMS, RESILIENCE, AND COLLABORATIVE LEARNING. *Sustainability, 9*(7), 1232.

Booth, A., Sutton, A., & Papaioannou, D. (2016). SYSTEMATIC APPROACHES TO A SUCCESSFUL LITERATURE REVIEW (2nd ed.). SAGE Publications.

Booth, W. C., Colomb, G. G., Williams, J. M., Bizup, J., & Fitzgerald, W. T. (2016). THE CRAFT OF RESEARCH (4th ed.). University of Chicago Press.

Bramwell, B., & Lane, B. (2011). CRITICAL RESEARCH ON THE GOVERNANCE OF TOURISM AND SUSTAINABILITY. *Journal of Sustainable Tourism, 19*(4–5), 411–421.

Dangi, T. B., & Jamal, T. (2016). AN INTEGRATED APPROACH TO "SUSTAINABLE COMMUNITY-BASED TOURISM". *Sustainability, 8*(5), 475.

Giampiccoli, A., & Mtapuri, O. (2015). BETWEEN THEORY AND PRACTICE: A CONCEPTUALIZATION OF COMMUNITY-BASED TOURISM AND COMMUNITY PARTICIPATION. *Loyola Journal of Social Sciences, 19*(1), 28–52.

Goodwin, H., & Santilli, R. (2009). COMMUNITY-BASED TOURISM: A SUCCESS? ICRT Occasional Paper No. 11.

Hafezi, F., Bijani, M., Gholamrezai, S., Savari, M., & Krause, S. P. (2023). TOWARDS SUSTAINABLE COMMUNITY-BASED ECOTOURISM: A QUALITATIVE CONTENT ANALYSIS. *Science of the Total Environment, 891*, 164444.

Jameel, A., Hussain, A., Kanwel, S., & Guo, W. (2025). ADVANCING SUSTAINABLE RURAL TOURISM IN CHINA: THE ROLE OF SYSTEM DEVELOPMENT AND COMMUNITY SUPPORT THROUGH A MODERATED MODEL. *Humanities and Social Sciences Communications, 12*, Article 45.

Pineda, F., Padilla, J., Torres, J. C. G., Rubio, A. E., Botero, C. M., & Suarez, A. (2023). COMMUNITY PREFERENCES FOR PARTICIPATING IN ECOTOURISM: A CASE STUDY IN A COASTAL LAGOON IN COLOMBIA. *Environmental Challenges, 11*, 100713.

Samal, R., & Dash, M. (2023). ECOTOURISM, BIODIVERSITY CONSERVATION AND LIVELIHOODS: UNDERSTANDING THE CONVERGENCE AND DIVERGENCE. *International Journal of Geoheritage and Parks, 11*, 1–20.

Scheyvens, R., & Momsen, J. H. (2008). TOURISM AND POVERTY REDUCTION: ISSUES FOR SMALL ISLAND STATES. *Tourism Geographies, 10*(1), 22–41.

Scheyvens, R., & Van der Watt, H. (2021). TOURISM, EMPOWERMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT: A NEW FRAMEWORK FOR ANALYSIS. *Sustainability, 13*(5), 2734.

Sebele, L. S. (2010). COMMUNITY-BASED TOURISM VENTURES, BENEFITS AND CHALLENGES: KHAMA RHINO SANCTUARY TRUST, CENTRAL DISTRICT, BOTSWANA. *Tourism Management, 31*(1), 136–146.

Sharpley, R. (2020). TOURISM, SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND THE THEORETICAL DIVIDE: 20 YEARS ON. *Journal of Sustainable Tourism, 28*(11), 1932–1946.

Sianipar, I. M. J., Lee, C. H., Kim, D. C., & Suryawan, I. W. K. (2025). ADAPTIVE STRATEGIES AND COMMUNITY ENGAGEMENT FOR SUSTAINABLE CONSERVATION AND TOURISM IN KOMODO NATIONAL PARK, INDONESIA. *International Journal of Geoheritage and Parks, 13*, 335–349.

Stone, M. T., & Nyaupane, G. P. (2015). PROTECTED AREAS, TOURISM AND COMMUNITY LIVELIHOODS LINKAGES: A COMPREHENSIVE ANALYSIS APPROACH. *Journal of Sustainable Tourism, 23*(4), 673–692.

Stone, M. T., & Stone, L. S. (2020). CHALLENGES OF COMMUNITY-BASED TOURISM IN BOTSWANA: A REVIEW OF LITERATURE. *Transactions of the Royal Society of South Africa, 75*(2), 141–154.

Su, D., Wall, G., & Eagles, P. F. J. (2007). EMERGING GOVERNANCE APPROACHES FOR TOURISM IN PROTECTED AREAS OF CHINA. *Environmental Management, 39*(6), 749–759.

Snyman, S., & Bricker, K. S. (2019). LIVING ON THE EDGE: BENEFIT-SHARING FROM PROTECTED AREA TOURISM. *Journal of Sustainable Tourism, 27*(6), 705–719.

Tolkach, D., & King, B. E. M. (2015). STRENGTHENING COMMUNITY-BASED TOURISM IN A NEW RESOURCE-BASED ISLAND NATION: WHY AND HOW? *Tourism Management, 48*, 386–398., e02052.